

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk menciptakan tata Kelola yang baik dan handal. Salah satunya dengan cara meningkatkan pengembangan kebijakan sistem akuntansi pemerintah yang berupa standar akuntansi pemerintah (SAP) yang bertujuan untuk mendapatkan memberikan pedoman pokok dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan pemerintah yang baik dan relevan pada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Pemerintahan adalah suatu entitas mempunyai kewajiban ketika membuat laporan keuangan atas dasar gambaran rasa pertanggungjawaban dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu instansi. Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan yang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjadikan sistem pemerintahan yang tadinya sentralistik menjadi desentralistik dan menjadi tuntutan yang harus dilaksanakan agar sistem pemerintahan menjadi lebih baik. Undang-undang Nomor 32 dan undang-undang Nomor 33 lebih menekankan pengembangan otonomi daerah dengan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, pemerataan, demokrasi dan pengembangan peran.

Dengan adanya laporan keuangan tersebut yang bertujuan memberikan informasi-informasi mengenai seluruh transaksi masuk maupun transaksi keluar serta dapat mengetahui posisi keuangan yang dilaksanakan suatu entitas dalam satu periode pelaporan. hal tersebut dapat menghasilkan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah maupun pusat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya yaitu meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Saldo, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Selain itu, dengan adanya penggunaan SAP laporan keuangan pusat atau daerah terlihat lebih berkualitas (dapat dipahami dipahami, andal, dapat dibandingkan dan relevan. Dapat dipahami merupakan suatu informasi yang disajikan dalam bentuk sebuah laporan keuangan yang dapat dipahami oleh pembaca dan dinyatakan dalam bentuk istilah dengan disesuaikan batas pemahaman yang diasumsikan memiliki pengetahuan yang memuaskan atas aktivitas lingkungan operasi entitas pelaporan. Sedangkan andal merupakan suatu informasi yang terdapat didalam laporan keuangan, menyajikan secara jelas, fakta dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dibandingkan merupakan suatu informasi yang tertulis didalam laporan keuangan akan menjadikan lebih berguna jika dibandingkan dengan laporan

keuangan periode sebelumnya atau pada laporan keuangan entitas pada umumnya. Relevan merupakan suatu informasi yang terdapat didalam laporan keuangan dan dapat mempengaruhi keputusan pengguna serta membantu mereka untuk mengevaluasi suatu peristiwa baik masa kini maupun masa lalu, hingga memprediksi masa depan dengan mengecek dan menekankan hasil pertimbangan dimasa lalu

Tercapainya otonomi daerah merupakan salah satu kewajiban, hak dan wewenang daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat yang ada disekitar berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dengan adanya peraturan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah merupakan kebijakan yang sangat dipandang demokratis dalam memenuhi aspek desentralisasi sesungguhnya. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, maka melimpahkan sebagian kewenangan Pemerintah Indonesia kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah untuk menyelenggarakan tugas kementerian dan lembaganya.

Selain itu, laporan keuangan yang tidak dapat dikatakan berkualitas memberikan peluang terhadap orang-orang yang mencari kesempatan untuk melakukan penyimpangan tindakan-tindakan kecurangan, korupsi, kebohongan dan kekeliruan terutama dalam bidang keuangan yang akan menimbulkan adanya tuntutan hukum. Dengan berjalannya waktu jika tindakan-tindakan tersebut dilakukan terus menerus dapat mengakibatkan rakyat akan menanggung akibatnya. Berdasarkan data dari [bengkuluekspress.com](http://bengkuluekspress.com) yang mengungkapkan bahwa adanya

dugaan korupsi tunjangan dana beban kerja di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dimana hasil dari audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerugian dana keuangan mencapai 1,4 miliar. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa di daerah Provinsi Bengkulu masih belum stabil. Dalam laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para stakeholder yang diantaranya pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD, investor, kreditor dan masyarakat umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara.

Selain itu, berdasarkan data dari <https://bengkulu.bpk.go.id/bu-bs-dan-rl-kembali-wtp/> Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu kembali menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022. LHP tersebut diterima oleh unsur pimpinan perwakilan yaitu DPRD, kepala daerah dan inspektur entitas terkait. Setelah LHP tersebut diserahkan kepada perwakilan dalam sambutannta mengumumkan kabar yang mrmbanggakan bahwa ketiga entitas tersebut berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) seperti yang telah diperoleh pada pemeriksaan tahun sebelumnya.

Tentunya, SDM juga mempunyai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sumber Daya Manusia merupakan seluruh manusia yang didalamnya terlibat suatu organisasi dalam mengupayakan terciptanya tujuan pada institusi tersebut. Dapat dilihat pegawai yang terdapat didalam SKPD merupakan Sumber Daya Manusia yang berkedudukan penting untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Aparatur pemerintahan seharusnya dibekali dengan pengetahuan yang cukup

khususnya terkait dengan PP No. 71 aturan tersebut dapat berjalan dengan semestinya.

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dapat dikatakan bisa meminimalisir pemborosan suatu anggaran pemerintah daerah dimana SAP berbasis akrual telah mengeluarkan anggaran sesuai dengan jumlah yang dinyatakan. Hal tersebut sesuai dengan Al- Qur'an surah Al-baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيْنَكُم كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هَٰذَا تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! jika kamu melakukan hutang piutang dengan waktu yang telah ditentukan, maka kamu menuliskannya. hendaklah seorang yang menuliskannya dengan benar sesuai dengan perintah yang Allah SWT kerjakan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah engkau mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya tidak mampu maka hendaklah sebagai wali mendiktekannya dengan benar. Janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya".*

Berdasarkan potongan ayat diatas memiliki makna bahwa katakanlah orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan transaksi hutang piutang dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka lakukan semua pencatatan untuk

menjaga harta yang lainnya agar menghindari dari semua kejahatan yang tidak diinginkan. Selain itu juga, carilah orang yang terpercaya dan jujur untuk melakukan pencatatan tersebut. Jika seorang penghutang ialah termasuk orang yang berbuat mubazir, maka hal itu yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT.

Menurut Angelicca (2019) menyimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah karena dengan adanya penerapan SAP tersebut maka semakin baik penerapan SAP pemerintah daerah, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya penerapan SAP menjadikan salah satu syarat untuk meningkatkan atau menaikkan kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Bengkulu sesuai dengan SAP yang telah ditentukan.

Menurut Yusrianti et al., (2021) menyimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah karena apabila pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang semakin kompeten maka semakin bisa membuat suatu penyajian laporan keuangan lebih berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa peran SDM sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah terutama dalam bidang pendidikan.

Menurut Mawarni & Nuraini (2021) menyimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah karena tingkat pendidikan atau sering disebut dengan jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggelica (2019) adalah menggabungkan beberapa variabel yang mengacu pada kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Bengkulu. Adapun perbedaan yang pertama terdapat di variabel independen yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Tingkat Pendidikan dengan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan daerah. Selain itu perbedaan yang kedua terdapat di waktu penelitian. Sedangkan perbedaan ketiga terdapat pada objek dan subjek penelitian yaitu Objek pada penelitian sebelumnya terdapat di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah, sedangkan pada penelitian ini berada di daerah Provinsi Bengkulu dan Subjek pada penelitian ini di Dinas Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berada di Provinsi Bengkulu karena peneliti ingin memberikan kontribusi yang nyata dalam bidang penelitian. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu”**.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini adalah Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Tingkat Pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Bengkulu.

### **C. Rumusan Masalah**

Dengan adanya usaha yang dapat menghasilkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat adalah menyajikan dan Menyusun laporan keuangan. Pada penelitian ini untuk mengetahui kualitas laporan keuangan daerah maka Adapun rumusan masalah diantaranya:

1. Apakah Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui atau memperoleh informasi mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Tingkat Pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Bengkulu.

Adapun tujuan penelitian secara rinci diantaranya:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI terhadap kualitas laporan keuangan daerah Provinsi Bengkulu.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu.



3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca untuk menambah wawasan, ilmu tentang Penerapan SAP berbasis AkruaI terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan sebagai bahan referensi.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan memberikan informasi mengenai kualitas laporan keuangan pada penerapan standar akuntansi berbasis akruaI, kompetensi sumber daya manusia dan tingkat Pendidikan.

### 2. Manfaat secara praktis

#### a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah daerah untuk menambah wawasan dan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang sebelumnya menjadi laporan keuangan yang lebih baik.

#### b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat, pengalaman dan memberikan gambaran terhadap pemecahan dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi.